

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya Jualah Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Secara substantif, Renstra Dinas Strategis Allah SWT, berkat rahmat dan limpahan karunia- Nya Jualah Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “*TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA*”.

Rencana Strategis Kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tebo. Sebagai salah satu pilar bagi terwujudnya masyarakat cerdas, berdaya saing, dan akuntabilitas pemerintahan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi acuan kerja bagi semua para pihak, terutama unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Acuan dan pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan program peningkatan mutu dan kinerja kapasitas kelembagaan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo ini diharapkan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan melalui partisipasi aktif dalam mengawal dan menopang semua kegiatan dan program pembangunan bidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Muara Tebo, 2025

KEPALA DINAS,


Drs. TAUFIK KHALDY
Pembina Utama Madya/ IV.c
NIP. 197306241994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.2. Permasalahan Perangkat Daerah	6
2.3. Isu Strategis Perangkat Daerah	10
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
3.1. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	28
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran	
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	30
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran	
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	30
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	34
4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	
4.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	
 BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Urusan Pemerintahan.....	11
Tabel 2.2	Jumlah SDM DINSOSP3A.....	11
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana penunjang	12
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
Tabel 2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan	12
Tabel 2.6	Capaian SPM Dinas	13
Tabel 2.7	Teknik menyimpulkan Isu Strategis PD	13
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	32
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	32
Tabel 3.3	Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra PD	32
Tabel 4.1	Teknik merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD	34
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	38
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	41
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	60
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur organisasi	7
Gambar 3.1	Konsep Renstra OPD	
Gambar 3.2	Kerangka keterkaitan RPJMD dengan tujuan Renstra PD	Gambar
4.1	Kerangka rumusan program/kegiatan/Subkegiatan	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Tebo.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang RI 23 Tahun 2014 menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematis dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya pertumbuhan pada skala ekonomi yang lebih kecil (mikro, masyarakat/komunitas), yaitu suatu pendekatan kemasyarakatan yang terfokus kepada pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat pada skala menengah dan kecil. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui prosedur dan teknik perencanaan partisipatif.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pengertian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan bersifat indikatif.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

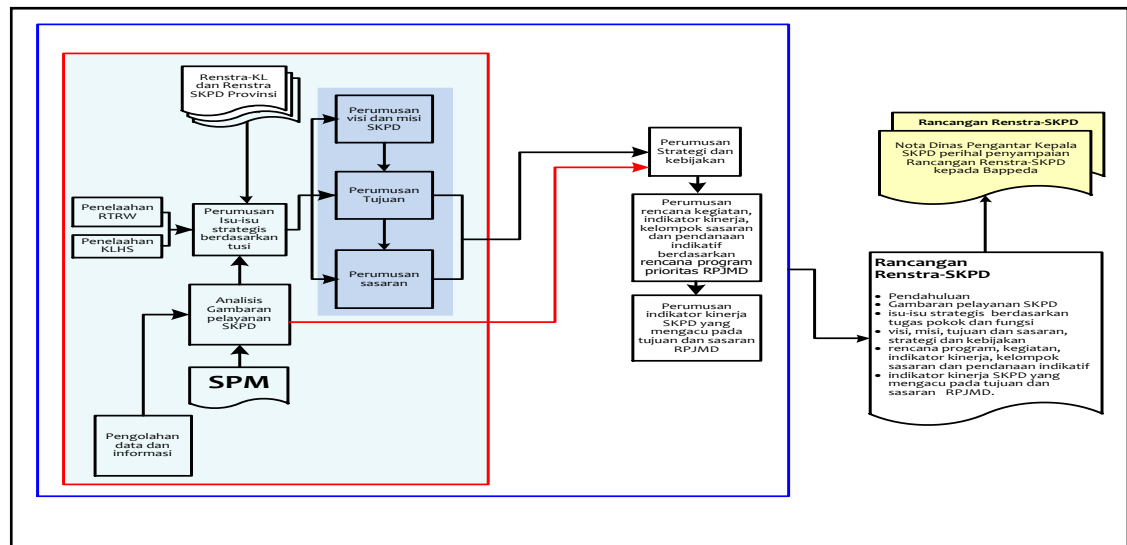
Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan dengan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/ Kota dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota



Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap Tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Tebo tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang

hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yakni membantu Bupati dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimaksudkan untuk mendorong partisipasi perempuan dan masyarakat dalam pembangunan yang mengisyaratkan kepada kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo diarahkan pada pembangunan agribisnis untuk menyokong perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor perkebunan.

Dalam RPJMD rumusan Visi dan Misi merupakan bagian utama dalam dokumen RPJMD. Visi menggambarkan harapan akan kondisi yang lebih baik yang hendak diwujudkan pada masa depan, dalam hal ini lima tahun mendatang. Visi yang dirumuskan merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang ditransformasikan menjadi visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tebo tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA ”

Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik;
4. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029 memiliki beberapa tujuan yakni:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Tebo yang cerdas dan sehat;
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah berupaya mewujudkan tujuan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029 yang merupakan tujuan Kabupaten Tebo yang kedua yaitu :

“ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan ”

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan.

Prinsip good governance ini telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tebo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 29. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 1419);

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
36. Instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo tahun 2024 Nomor 5) ;
39. Peraturan daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teno Tahun 2025 – 2029 (Lembaran

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamatkan oleh RPJMD 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran

pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Tebo dalam upaya mendukung tujuan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 yang merupakan periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo 2025-2045 dengan tahap pertama memiliki tema pembangunan berupa “ **Memperkuat Pondasi Daya Saing Daerah**”. Tema pembangunan 3 periode berikutnya mencirikan tahapan yang semakin meningkat hingga visi 2045, yaitu: “ Kabupaten Tebo Maju, Berbudaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Visi tersebut selaras dan menopang pencapaian Visi Nasional, yaitu” Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan urusan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD ahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing- masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengumumkan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rentsra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengumumkan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rentsra Perangkat Daerah ini.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.1.2. SDM Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih oprasional.

2.1.3. Asset/Modal

Menyajikan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki perangkat daerah sebagai sumberdaya dalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat.

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan (Tingkat capaian kinerja PD) 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dan data lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis secara deskriptif dan diagnostic.

2.1.5. Kelompok sasaran layanan perangkat daerah

Menjelaskan Gambaran kelompok sasaran yang menjadi targer pelayanan urusan bidang sosial dan urusan bidang admindukcapil

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam pelayanan

Menjelaskan tentang organisasi pusat maupun daerah yang selalu berkolaborasi dalam menunjang peningkatan pelayanan perangkat daerah.

2.2. Permasalahan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan pada Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD

2.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi isu strategis sesuai Lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi PD, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN Tahun 2025-2029, Rensra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/Lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, ataupun hasil penjangingan aspirasi yang dilakukan oleh PD, serta

potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berisi perumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan NSPK RPJMD tahun 2025-2029.

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Memberikan Gambaran terhadap rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Rentsra PD

3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah

Menjelaskan terhadap arah kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Menguraikan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan pendanaan serta target dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

1.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Menggambarkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

1.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Menggambarkan target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan terhadap kesimpulan penting dan kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang Sosial dan Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil, disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pembagian Urusan

Pemerintahan

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
NO	PROGRAM	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1	Pemberdayaan Sosial	a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi. c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
2	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan Hukum

3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan. c. Pengelolaan data fakir miskin nasional.	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
4	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional. b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota
5	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
NO	PROGRAM	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1	Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PUG)	-	-	a. Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

2	Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	a.Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota
3	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	-	a.Pengumpulan, pengolahan analsis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota
4	Pemenuhan Hak Anak	-	-	a.Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah,

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengemukakan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.1.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, bidang kualitas hidup perempuan pemenuhan hak anak;
2. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup Perempuan dan pemenuhan hak nak, serta perlindungan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pembinaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penyelenggaraan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup Perempuan dan pemenuhan haka nak, serta perlindungan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3. Struktur Organisasi

organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

TUGAS

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas.

FUNGSI

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup Perempuan dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup Perempuan dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Penyelenggaraan penyusunan norma, standar,

prosedur, kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup Perempuan dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

TUGAS

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

FUNGSI

- a. Pengoordinasian, penyusunan kebijakan, rencana, program kegiatan dan anggaran di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup Perempuan dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- d. Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di

- lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak ;
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan Masyarakat di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup Perempuan dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - i. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kualitas hidup Perempuan dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - l. Penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Sosial

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

TUGAS

1. Bidang rehabilitasi sosial di pimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

FUNGSI

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/ atau lembaga;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ atau lembaga;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan / atau lembaga;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS (ODHA) dan NAPZA di luar panti dan/atau lembaga;

6. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
7. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial;
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang rehabilitasi sosial;
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

TUGAS

1. Bidang perlindungan dan jaminan sosial di pimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan sosial bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, perlindungan sosial korban bencana non alam, jaminan sosial dan bantuan masyarakat serta warga negara migran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang – undangan.

FUNGSI

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana non alam, dan perlindungan sosial korban bencana sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga, anak terlantar dan bantuan masyarakat serta warga negara migran;
3. Pelaksanaan kebijakn teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
4. Pelaksanaan kebijakn teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
5. Pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan cakupan kabupaten;
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
7. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan survise di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

TUGAS

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

FUNGSI

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
3. Pelaksanaan kebijakn teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial potensi sumber daya sosial;
4. Pelaksanaan kebijakn teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
5. Pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan cakupan kabupaten;
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
7. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan survise di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

TUGAS

1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus bidang penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan Lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan dan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan

- pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
3. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 4. Pelaksanaan koordinasi pelayanan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 5. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia perlindungan perempuan dan lembaga penyedia bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 7. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
 8. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan survise di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

TUGAS

- a. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi bidang penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang kelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak

anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan kualitas keluarga bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
3. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
4. Pelaksanaan koordinasi pelayanan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
5. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia perlindungan perempuan dan lembaga penyedia bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam

pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;

7. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
8. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan survise di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya

2.1.2. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang pegawai., secara rinci disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Jumlah SDM DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	1	-	1	-	2
2	SMP Sederajat	-	-	-	1	1
3	SMA Sederajat	3	2	1	2	8
4	D3	-	1	-	1	2
5	S1	12	13	3	2	30
6	S2	3	1	-	-	4
7	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		18	17	5	6	47

Berdasarkan dari tingkat pendidikan terdapat dari 47 (empat

puluh tujuh) orang aparatur yang ada 8.51% berpendidikan S.2, 63.82% berpendidikan S.1, sebesar 4,25% berpendidikan D.III, 17.02% yang berpendidikan SLTA sederajat, 2,12% berpendidikan SLTP, serta 4.25% berpendidikan SD.

Berdasarkan golongan, jumlah aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo pada Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) orang aparatur yang mempunyai golongan IV, 25 (dua puluh lima) orang golongan III, 2 (dua) orang yang mempunyai golongan II, 1 (satu) orang yang mempunyai golongan I, dan 11 (sebelas) orang tenaga non ASN.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	5	6	11
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	2	1	3
3	Golongan I	1	-	1
4	Golongan II	1	1	2
5	Golongan III	12	13	25
6	Golongan IV	2	3	5
<i>Jumlah</i>		<i>18</i>	<i>18</i>	<i>47</i>

Berdasarkan data diatas berdasarkan jumlah ASN yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo belum memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

2.1.3. Asset/ Modal

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan 2 urusan pemerintahan, tentunya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo hingga akhir tahun 2024 secara umum merupakan sarana dan prasarana peninggalan yang sudah cukup lama, terutama pada asset gedung dan Kendaraan operasional yang semestinya perlu dilakukan peremajaan.

Untuk memperoleh gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam rangka penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat, disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan prasarana penunjang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas Roda 2			
2	Kendaraan Dinas Roda 4			
3	Kendaraan Dinas Roda 6			
4	Laptop/ Notebook			
5	Kursi Kerja			
6	Kursi Rapat			
7	Meja Kerja ½ Biro			
8	Meja Kerja 1 Biro			
9	Personal Computer			
10	Lemari Arsip			
11	Televisi			
12	Printer			
13	Telepon/ Faximile			
14	Rak Buffer Stok			
15	Rak Arsip			
16	Lemari Besi /Billing Kabinet			
17	AC			
18	Sound System			
19	Mesin Rumput			
20	Tangga			
21	UPS			
22	Kursi Tamu/ Sofa			
22	Kursi Tunggu			
23	Kipas Angin			
23	Infocus			

Uraian peralatan dan perlengkapan kantor tersebut di atas menggambarkan masih sangat kurang dan terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan menjadi prioritas dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih optimal dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tebo.

Uraian Gedung dan bangunan lainnya yang dimiliki oleh Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, sesuai dengan kondisi tahun 2025, sehingga dapat menjadi acuan penyusunan rencana kebutuhan ke depan.

Tabel 2.5
Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya berdasarkan kondisi
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Jenis Gedung & Bangunan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	-	1
2	Gudang Buffer Stock (Barang Bantuan Kemensos-RI)	1	-	1
3	Taman Makam Pahlawan Nasional	1	-	1

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kerjanya. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah secara umum digambarkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan serta Capaian kinerja keuangan.

Gambaran capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tahun 2022-2025, disajikan pada tabel 2.4. Sedangkan gambaran Capaian kinerja keuangan Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2022-2025 disajikan pada tabel 2.5 dibawah ini.

Disamping itu Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan salah satu dinas sebagai perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan

Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemenuhan SPM menjadi syarat mutlak bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Gambaran terhadap capaian kinerja SPM dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini

Tabel.2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Tahun 2023 – 2026

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Tingkat Capaian pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat daerah	Predikat	B	B	B	B	BB	B	B	B			100	100	100		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
1	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuanga SKPD perangkat daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30/12	30/12	30/14	30/14	36/14	30/12	30/14	27/14			100	100	90		
3.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Tingkat Capaian pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1	1	1	1	1		1	1			100	100	100		
5.	Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
5. Administrasi Umum				Cakupan pelayanan administrasi umum yang terlaksana	Persentase	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
10.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per-UU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		
11.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
13.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	-	1	1	-	-	-			-	-	-		
14.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Laporan Periode pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	laporan	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		

16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
18.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
9. Penataan Organisasi					1	1	1	1		1	1				100	100		
20.	Monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana			1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase pemberdayaan sosial di masyarakat	Persentase	45	46	47	48	49	-	-	17.92			-	-	38.12		
10. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil		Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	279	279	279	50	50	-	-	50			-	-	17.92		
21.	Fasilitasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/KAT (keluarga)	Keluarga	279	279	279	50	50	-	-	50			-	-	17.92		
11. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota		Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota	Orang	12	12	13	13	12	12	12	12			100	100	100		
22.	Peningkatan kemampuan potensi TKSK kewenangan kabupaten/kota	Jumlah TKSK kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Orang	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
23.	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan LK3 kewenangan kabupaten/kota (sertifikat)	Sertifikat	1	1	1	-	-	1	1	-			100	100	-		
III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis serta PMKS lainnya di luar panti	Persentase	50	51	52	53	54			19.92					38.30		

12.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial			Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Orang	250		250			250		1.464			100		585.6		
24.	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	250	180			250	280	1409			100	112	782.77			
25.	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	110	30	57				27	55			40	90	96.49			
26.	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	-	-	-	50	50	-	-	-			-	-	-			
13.Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Orang	4		65		4		55			100		84.61			
27.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota.	Peserta	4	50	50			4	50	50			100	100	100			
28.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			15					5					33.33			
IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan keluarga penerima manfaat	Persentase	45	46	47	48	49		18.82					38.76			
14. Pemeliharaan anak – anak terlantar				Orang															
29.	Penjangkauan anak – anak terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota																	
15. Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			Tersedianya data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Orang	81.128	81.128	113.000			81.128	114.850					101.63			
30.	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang didata	Jiwa	81.128	81.128	113.000					113.330					102.55			

31.	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ kota	Keluarga	9.000	9.000	8.000					7.594					94.92		
V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase penanganan bencana alam dan bencana sosial	Persentase	40	41	42	43	44										
16.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Orang	300		300			1.215		396			405		132		
32.	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan dalam kejadian luar biasa/ Bencana di Kabupaten/Kota	Orang	300	225	300			1.215	140	396			405	62	132		
33.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/ kota	Orang	300	200	100			300	200	100			100	100	100		
17.	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten	Orang	55	55	65			55	66	65			100	120	100		
34.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan kabupaten/ kota	Orang	55	55	65			55	66	65			100	120	100		
VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	Persentase	80	80	80	80	80	80	80	80			100	100	100		
18.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional	Jumlah taman makam pahlawan nasional yang tterpelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
35.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan kabupaten/Kota	Unit	1	1	1	1		1	1	1			100	100	100		
VII. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER (PUG) DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase peningkatan jumlah perempuan dalam legislatif dan eksekutif	Persentase	30	30	35	40	40										
19.	Pelebagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Perangkat Daerah	35	35	35	35	35	35	35	35			100	100	100		
36.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkroniosasi pelaksanaan PUG kewenangan.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
37.	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	1	1	-	-	-	1	1	-			100	100	-		

38.	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender.	Perangkat Daerah	-	-	35	35	35	35	35	35			-	-	100		
20. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota				1	1	1	1	1		1	1			100	100	100		
39.	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
40.	Advokasi kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Organisasi	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
21. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
41.	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
42.	Pengembangan KIE pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
VIII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria Kesetaraan Gender	Persentase	55	60	65	70	75			93.98					170		
22. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota		Terwujudnya pembinaan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak nak kewenangan kabupaten/kota	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
43.	Pelaksanaan KIE Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak bagi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	-	-	-	1	1	-	-	-			-	-	-		
44.	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
IX. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase kelengkapan data gender dan anak	Persentase	15	60	65	70	75	-	1	1			-	100			
23. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota				-	-	1	1	1	-	1	1			-	100	100		

45.	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	1	1	-	1	1			-	100	100		
X. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK		Persentase Pemenuhan hak anak	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	143			100	100	143		
24.	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
46.	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
25.	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya fasilitasi P2TP2A	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
47.	Penyediaan layanan peningkatan kulaitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak	30		30			30		43			100		143		

Tabel 2.7
Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Tahun 2023 - 2026

No	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata rata pertumbuhan			
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.713.400.969	4.868.866.117				4.605.956.930	4.346.898.716				97.72	89.28						
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.349.940	33.610.569	63.973.585			13.324.500	33.240.614	63.954.008			99.14	98.90	99.97						
1	Evaluasi kinerja perangkat daerah	13.349.940	33.610.569	63.973.585			13.324.500	33.240.614	63.954.008			99.14	98.90	99.97						
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.985.240.273	3.171.321.936	3.467.048.131			2.922.888.740	3.078.412.280	2.990.446.164			97.91	97.07	86.25						
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.869.501.873	3.058.223.536	3.352.989.731			2.808.379.740	2.965.313.880	2.879.815.764			97.87	96.96	85.89						
3.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	115.738.400	113.098.400	114.058.400			114.509.000	113.098.400	110.630.400			98.94	100	96.99						
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.999.690	46.801.450	46.802.225			33.955.900	46.801.450	37.798.700			99.87	100	80.76						
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.999.690	46.801.450	46.802.225			33.955.900	46.801.450	37.798.700			99.87	100	80.76						
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	30.000.000			-	-	29.997.900			-	-	99.99						
5.	Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU	-	-	30.000.000			-	-	29.997.900			-	-	99.99						
	4. Administrasi Umum	382.205.850	619.992.800	447.942.702			381.132.317	617.291.126	446.848.270			99.72	99.56	99.76						
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.985.860	4.985.800	4.985.495			4.982.500	4.985.800	4.984.995			99.93	100	99.99						
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.010.030	132.247.900	167.886.092			41.924.500	131.146.200	167.788.700			99.80	99.17	99.94						
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	62.000.000	74.500.500			59.859.700	62.000.000	74.463.230			99.77	100	99.95						
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.289.960	24.289.900	24.289.607			24.199.300	24.284.850	23.541.500			99.63	99.98	96.92						

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

10.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per-UU	5.760.000	6.309.200	6.121.008			5.040.000	4.827.400	5.933.000			87.50	76.51	96.93					
11.	Fasilitasi kunjungan tamu	20.160.000	20.160.000	20.160.000			20.150.000	20.135.000	20.160.000			99.95	99.88	100					
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	370.000.000	150.000.000			224.976.317	369.911.876	149.976.845			99.99	99.98	99.98					
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	208.000.100	185.180.440				207.928.060	184.619.256			-	100	99.70					
13.	Pengadaan Mebel	-	-	54.864.835			-	-	54.710.000			-	99.97	99.72					
14.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	208.000.100	130.315.605			-	207.928.600	129.909.256			-	99.97	99.69					
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		175.944.544	175.943.259	195.138.536			167.263.298	171.831.032	190.770.769			95.07	97.66	97.76					
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.004.150	40.002.865	59.414.820			33.943.299	383.511.032	56.147.669			84.85	96.27	94.50					
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.940.394	135.940.394	135.723.716			133.319.999	133.320.000	134.623.100			98.07	98.07	99.19					
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		308.791.550	457.730.055	432.780.498			308.290.111	450.452.368	402.463.649			99.84	98.41	92.99					
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	19.599.760	49.511.155	49.511.155			19.241.050	42.504.200	43.476.050			98.17	85.85	87.81					
18.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	250.766.990	226.010.000	226.010.000			250.651.811	225.968.300	208.434.500			99.95	99.98	92.22					
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.424.800	182.208.900	157.259.343			38.397.250	181.979.868	150.553.099			99.93	98.87	95.74					
8. Penataan Organisasi		38.424.000	-	-			38.400.000	-	-			99.94	-	-					
20.	Monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	38.424.000	-	-			38.400.800	-	-			99.94	-	-					
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		145.252.180	108.998.250	267.569.886			144.405.060	108.964.450	264.029.970			99.54	99.97	98.68					
9. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil		145.252.180	105.000.000	185.723.456			144.405.060	104.966.200	183.157.670			99.54	99.97	98.62					
21.	Fasilitasi pemberdayaan sosial KAT	145.252.180	105.000.000	185.723.456			144.405.060	104.966.200	183.157.670			99.54	99.97	98.62					

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

10. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	-	3.998.250	81.846.430			-	3.998.250	80.872.300			-	100	98.81						
Peningkatan kemampuan potensi TKSK kewenangan kabupaten/kota	-	-	81.846.430			-	-	80.872.300			-	-	98.81						
22 Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	3.998.250	-			-	3.998.250	-			-	100	-						
III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	248.252.180	439.638.870	900.359.987			248.252.180	424.213.100	873.752.800			99.55	97.43	98.24						
11. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	227.292.300	354.638.820	786.317.687			226.275.180	345.524.200	772.506.700			99.55	97.43	98.24						
22 Penyediaan permakanan	148.292.300	199.277.220	589.012.837			148.182.700	197.517.100	585.524.100			99.93	99.12	99.41						
23 Penyediaan alat bantu	79.000.000	155.361.600	197.304.+++850			78.092.480	148.007.100	186.982.600			98.85	95.27	94.77						
12. Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	20.959.880	85.000.050	114.042.300			20.920.700	78.688.900	101.246.100			99.81	92.58	88.78						
24 Pemberian bimbingan kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti P	20.959.880	55.000.100	77.000.100			20.920.700	54.851.550	76.365.800			99.81	99.73	99.18						
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	-	29.999.950	37.042.200			-	23.837.350	24.880.300			-	79.46	67.17						
IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.298.389.270	787.606.774	417.687.103			1.289.403.791	763.256.800	364.191.998			99.31	96.91	87.19						
13. Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1.298.389.270	787.606.774	417.687.103			1.289.403.791	763.256.800	364.191.998			99.31	96.91	87.19						
25 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.208.035.480	333.000.574	83.000.376			1.206.669.991	316.047.100	74.971.748			99.89	94.91	90.33						
26 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90.353.790	454.606.200	334.686.727			82.733.800	447.209.700	289.220.250			91.57	98.37	86.42						
V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	347.977.940	587.648.750	607.626.867			325.335.550	537.627.870	564.298.394			93.49	91.49	92.87						
14. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	200.977.940	447.649.000	450.295.113			178.398.750	397.628.120	406.966.640			88.77	88.83	90.38						
27 Penyediaan makanan	148.332.940	377.052.000	253.741.623			125.785.300	329.745.220	226.195.145			84.80	87.45	89.14						
28 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	52.645.000	70.597.000	196.553.400			52.613.450	67.882.900	180.771.495			99.94	96.16	91.97						

	15. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	147.000.000	139.999.750	157.331.754			146.936.800	139.999.750	157.331.754			99.96	100	100					
29	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	147.000.000	139.999.750	157.331.754			146.936.800	139.999.750	157.331.754			99.96	100	100					
	VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	90.293.480	85.000.000	96.931.894			87.671.900	84.850.100	96.058.250			97.10	99.82	99.10					
	16. Pemeliharaan taman makam pahlwan nasional kabupaten/kota	90.293.480	85.000.000	96.931.894			87.671.900	84.850.100	96.058.250			97.10	99.82	99.10					
30	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	90.293.480	85.000.000	96.931.894			87.671.900	84.850.100	96.058.250			97.10	99.82	99.10					
	VII. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	326.206.150	386.161.576	587.504.174			323.976.968	385.348.475	514.002.205			99.32		86.67					
	17. Pelembagaan Pengarus Utama Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	89.236.000	215.261.576	254.271.100			88.539.699	215.114.475	203.383.800			99.22		87.49					
31	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	71.816.000	100.000.000	118.061.074			71.305.899	99.893.900	92.383.800			99.29		80.11					
	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	17.420.000	115.261.576	-			17.233.800	115.220.575	-			98.93		78.25					
32	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	-	136.210.026			17.233.800	115.220.575	111.315.590			98.93		81.72					
	18. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	166.073.610	80.000.000	200.000.000			164.791.069	79.776.800	188.469.175			99.23		94.23					
33	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	166.073.610	80.000.000	200.000.000			164.791.069	79.776.800	188.469.175			99.23		94.23					
	19. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	70.896.540	90.900.000	133.233.074			70.646.200	90.457.200	121.833.640			99.65		91.44					
34	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	70.896.540	90.900.000	92.865.480			70.646.200	90.457.200	92.478.025			99.65		99.58					
	Pengembangan KIE pemberdayaan perempuan kewenangan	-	-	40.367.594			-	-	92.478.025					72.72					

	kabupaten/kota																	
VIII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		40.136.230	132.353.250	276.062.980			40.080.600	127.692.806	196.969.453			99.86		71.35				
20. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Tingkat daerah kabupaten/kota		40.136.230	132.353.250	276.062.980			40.080.600	127.692.806	196.969.453			99.86		71.35				
	Pelaksanaan KIE Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak bagi kewenangan kabupaten/kota	-	-	115.537.580			-	-	113.767.753			-	-	98.47				
35	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	40.136.230	132.353.250	160.525.580			40.080.600	127.692.806	83.201.700			99.86		51.83				
IX. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		-	-	33.490.420			-	-	23.236.620			-	-	69.38				
Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota		-	-	33.490.420			-	-	23.236.620			-	-	69.38				
	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan kabupaten/kota	-	-	33.490.420			-	-	23.236.620			-	-	69.38				
IX. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		132.039.920	124.518.960	426.574.385			131.867.855	113.778.200	413.016.467			99.87		96.82				
21. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota		24.170.490	24.170.490	285.381.300			24.082.200	24.068.350	273.682.330			99.63		95.90				
36	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA kewenangan kabupaten/kota	24.170.490	24.170.490	285.381.300			24.082.200	24.068.350	273.682.330			99.63		95.90				
22. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota		107.869.430	100.348.470	141.193.085			107.785.655	89.709.850	139.334.137			99.92		98.68				
37	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	107.869.430	100.348.470	141.093.085			107.785.655	89.709.850	139.334.137			99.92		98.68				
JUMLAH		6.566.316.737	7.365.327.399	8.482.673.813			6.455.103.270	7.151.688.731	7.656.454.873			98.31		90.26				

Tabel 2.8. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2022 - 2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output										Total Pencapaian
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Orang	50	144	63	127	450	600	50				871
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Orang	250	180	50	100	100	209	100				489
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Orang	80	50	50	80	450	600	50				730
4	Rehabilitasi sosial dasar ex. Penyakit sosial (PSK, Narkoba, gangguan jiwa, dan penyakit sosial lainnya di luar panti	Orang	-	-	-	-	-	-	-				-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Orang	200	1.090	200	140	200	382	200				1.612

2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, sasaran pelayanan dikelompokkan sesuai dengan beban dan tanggung jawab organisasi. Kelompok sasaran pelayanan terfokus pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak .

Adapun Kelompok Sasaran Pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Anak-Anak Rentan
- b. Difabel
- c. Lansia Terlantar
- d. Korban Bencana
- e. Warga Binaan
- f. Korban Kekerasan
- g. Korban Napza dan HIV/AIDS
- h. Mereka yang Difabel Bermasalah Sosial
- i. Perempuan Rentan
- j. Fakir Miskin
- k. Komunitas Adat Terpencil

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Mitra kerja yang saling mendukung dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah provinsi serta instansi pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi jambi.

Adapun Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. UPTD Sentra Alyatama Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Bappeda Kabupaten Tebo
3. Bakeuda Kabupaten Tebo
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
5. Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo
6. BPJS Kesehatan Kabupaten Tebo
7. RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo
8. Polres Tebo
9. BAZNAZ Tebo
10. Organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial dan perlindungan anak

2.2. PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan daerah merupakan agenda penting dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, perhatian terhadap permasalahan yang menghambat pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan merupakan hal yang mendasar. Analisis mendalam terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh daerah menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif. Pembahasan mengenai permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal.

Pembahasan mengenai permasalahan daerah menghambat pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan merupakan hal Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo berdasarkan atas tugas dan fungsi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya pusat rehabilitasi sosial yang menyebabkan minimnya layanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia terlantar;
2. Belum kuatnya basis data penerima bantuan sosial yang menyebabkan bantuan sosial belum tepat sasaran;
2. Minimnya jaminan sosial terkait kebencanaan akibat belum adanya dapur umum\ dan belum berfungsinya kampung siaga bencana;
3. Belum optimalnya Pengarus Utamaan Gender (PUG);
4. Belum optimalnya akses Perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
5. Belum optimalnya perlindungan perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak;
6. Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada anak belum optimal;
7. Kasus pernikahan dini masih cukup banyak.

2.3. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mendukung tugas Pemerintah Provinsi Jambi di bidang Sosial dan bidang perlindungan perempuan perlindungan anak . Fungsi pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi antara lain:

1. menyediakan prasarana dan sarana urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan fungsi pelayanan ini, faktor-faktor yang sering mempengaruhi fungsi pelayanan antara lain:

1. perumusan kebijakan anggaran dan regulasi;
2. SDM Sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Standar mutu layanan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial, Advokasi dan Rehabilitasi, yang tertangani. Sedangkan pada urusan administrasi kependudukan fokus prioritas adalah pada Persentase perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Secara spesifik disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Teknik menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINSOSP3A	PERMASALAHAN DINSOSP3A	ISU KLHS RELEVAN DENGAN DINSOSP3A	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SOSIAL			ISU STRATEGIS DINSOSP3A
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan dan pemanfaatan Data	Konsolidasi data belum sempurna	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Dampak global lingkungan tidak tergambar dalam data yang lengkap	Data yang ada tidak dapat mengantisipasi dampak dan resiko akibat dampak lingkungan	Pengintegrasian data program antisipasi dampak lingkungan belum terintegrasi dengan data kependudukan	Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat, kesetaraan gender dan
Infrastruktur dan SDM pelayanan dasar	Terbatasnya infrastruktur dan SDM pelayanan dasar	Kinerja layanan jasa ekosistem	Dampak lingkungan yang buruk memerlukan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Perubahan lingkungan menyebabkan peningkatan pemerlu atensi sosial terhadap pelayanan dasar	Disparitas antara pemerlu atensi Sosial dengan infrastruktur pelayanan dasar yang tersedia	

Partisipasi masyarakat	Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap kebijakan dan program kesejahteraan sosial	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Daya dukung lingkungan menjadi penting dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan	Daya dukung lingkungan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan	Keterlibatan masyarakat dan daya dukung lingkungan berkipat dalam pembangunan berkelanjutan	perlindungan anak
------------------------	---	---	--	---	---	-------------------

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

RPJMD sebagai operasionalisasi dari perencanaan jangka panjang, juga harus membangun keterhubungan yang sinergis dengan perencanaan lebih operasional di dalam Renstra maupun perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterhubungan ini diharapkan membangun perencanaan yang sinergis mulai dari jangka panjang, menengah hingga tahunan dan penganggarnya. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra.

RPJMD juga harus dijabarkan ke dalam RKPD. Berbagai rumusan kinerja baik dalam bentuk IKU, IKK dan kinerja program di dalam RPJMD harus dipedomani dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan perencanaan tahunan. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan APBD. Dengan demikian diharapkan tercapai pendekatan perencanaan dan penganggaran berupa money follow program, program follow result.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD bersifat ultimate outcome, makro, lintas sektor dan memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kondisi tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tujuan dan sasaran akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo 2025 - 2029

Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2030 Misi 1 Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan Misi 2 Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal Misi 3 Meningkatkan	SDM Tebo yang cerdas dan sehat		IPM	72,67	73,50	74,32	75,15	75,97	76,80	77,63
		Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas	RLS	8,04	8,37	8,69	9,02	9,34	9,67	10,00
			HLS	12,93	14,26	14,60	14,93	15,27	15,6	15,93
		Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat	UHH	73,62	73,91	74,21	74,50	74,80	75,09	75,38
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan		Tingkat kemiskinan	6,12	6,04-6,10	5,96-6,09	5,87-6,07	5,79-6,06	5,71-6,04	5,63-6,02
			LPE	3,97	4,04-4,16	4,30-4,34	4,47-4,53	4,63-4,71	4,80-4,90	4,97-5,09
			Indeks Gini	0,257	0,256	0,254	0,253	0,251	0,250	0,249
		Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa	PDRB Per Kapita	67,30	68,42	69,53	70,65	71,76	72,88	74,00
			Indeks Desa Membangun	0,7344	0,7447	0,7549	0,7652	0,7754	0,7857	0,7959
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,93	1,79	1,64	1,50	1,35	1,21	1,07

Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik Misi 4 Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi		Dukungan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	71,5	73,33	75,16	76,99	78,82	80,65	82,48
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana	IKLH	67,82	69,09	70,37	71,64	72,92	74,19	75,46
			Indeks Risiko Bencana	131,2	129,89	128,59	127,28	125,98	124,67	123,36
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	69,25	70,27	71,29	72,31	73,33	74,35	75,37
		Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berbasis transformasi digital	Nilai SAKIP	67,51	68,19	68,86	69,54	70,21	70,88	67,51
			Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,70	5,00	5,30	5,6	5,90	4,40
			SPI/MCP	77,80	78,65	79,51	80,36	81,22	82,08	77,80
			Indeks SPBE	2,74	2,86	2,98	3,10	3,215	3,33	2,74
		Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	iPKD	78,1	78,6	79,1	79,6	80,1	80,6	81,1
			Persentase peningkatan PAD	4,8	3,3-4,9	3,4-5	3,5-5,1	3,6-5,2	3,6-5,2	3,7-5,3

Tujuan perangkat daerah khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada prinsipnya disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana ada 2 (dua) urusan yang mendasari yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga perumusan tujuan perangkat daerah diambil dari filterisasi dari kedua urusan tersebut dalam suatu pernyataan terhadap eksistensi organisasi. Secara skematis dapat dilihat dari gambar berikut :



Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Berdasarkan NSPK yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, maka disepakati rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Tujuan Rencana Strategi :

**“ MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK ”**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi awal Tahun	Target Kinerja Tujuan pada tahun ke				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2		5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90.40*	90.40*	90.60	91.00	91.51	91.91

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 3.2

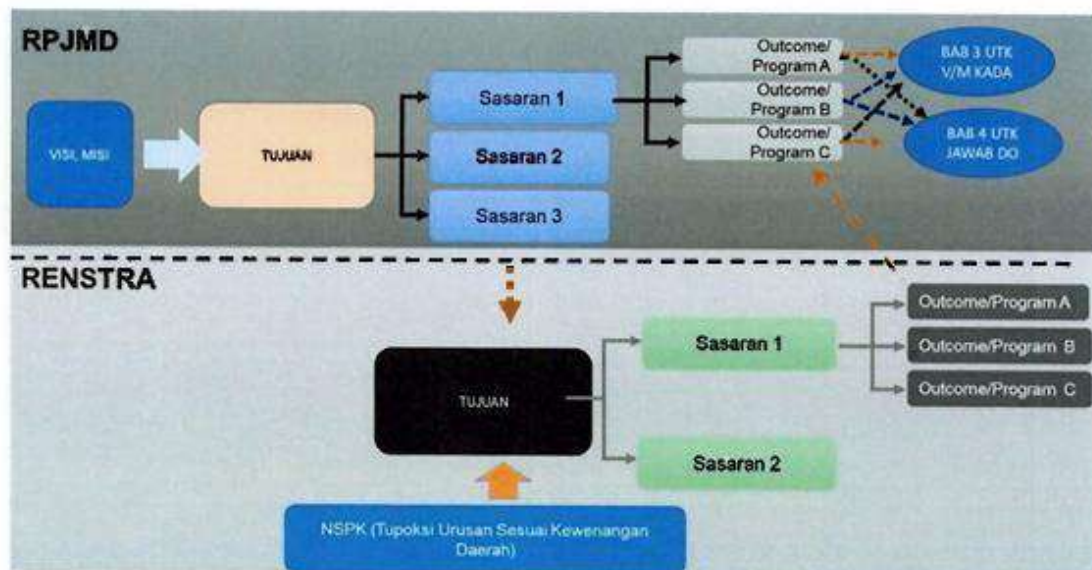
Tabel 3.2
Tujuan Jangka Menengah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A)
Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029

Formulasi perhitungan indikator tujuan :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan formulasi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia laki – laki dikurangi Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (IPM Laki -laki – IPM Perempuan), angka diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo.

Secara spesifik alur hubungan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati, dengan mempertimbangkan kondisi perangkat daerah maka perumusan sasaran organisasi akan diturunkan sesuai dengan bidang urusan yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian ultimate outcome program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

Sasaran Rencana Strategi :

“ Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat “.

Dengan Indikator Sasaran :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani

Berikut rumusan rangkaian pernyataan sasaran dan indikator sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Tebo sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 3.3

Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2025- 2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal Tahun	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks						
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)			Indeks						
		3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			Indeks						
		4. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)			Indeks						
			Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	51.72*	51.72*	51.74	51.76	51.77	51.78
				2. Persentase PPKS yang tertangani	Persen	44	44	45	46	48	50

*** Angka tahun 2021*

Secara spesifik rumusan sasaran organisasi yang ditetapkan dalam renstra perangkat daerah sebagai berikut :

“ Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat ”

Untuk lebih jelasnya teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra yang dilengkapi dengan Indikator dan target tahunan, kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
- Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berberbasis transformasi digital	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	91,63	92,8	93,35	94,5	95	96,5	97	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	66,26	66,26	66,26	67	67,62	69,87	70	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	73,11	74	75	76	77	78	79	
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	65,56	66	68	70	72	74	76	
		Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	58,35	58,93	59	59,5	60	60,5	61	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)	9	9	9	9	9	9	9	

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan mempertimbang kondisi perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas diperlukan penahapan strategi dalam renstra perangkat daerah, sehingga adanya rasionalisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun strategi renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan Data dan SDM	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM	Penguatan Kelembagaan dan Bantuan Sosial / Hibah	Evaluasi dan Monitoring untuk Keberlanjutan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan suatu rangkaian operasionalisasi NSPK yang akan diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD dan menjadi Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan bagi disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, dan tuna sosial.	Peningkatan Pemberian Bantuan bagi disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, dan tuna sosial, serta Masyarakat Miskin.	
			Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Bimbingan Mental, Fisik, dan Kesehatan Serta Keterampilan dalam panti.	

			Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PAS.	
			Mengurangi Beban Pengeluaran, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin, dan Meminimalisir Kantong-Kantong Kemiskinan.	
			Peningkatan Kapasitas SDM PSKS	
			Pemenuhan Logistik Bencana Alam dan Sosial.	
			Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Hak-Hak Anak, Korban Kekerasan dan TPPO	
2	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menerapkan Pelayanan Publik Berbasis Digital yang cepat, prima, dan terjangkau	Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan	
			Meningkatkan Pengembangan SDM Aparatur Perlindungan Perempuan dan Anak	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan Perempuan dan Anak	

BAB IV

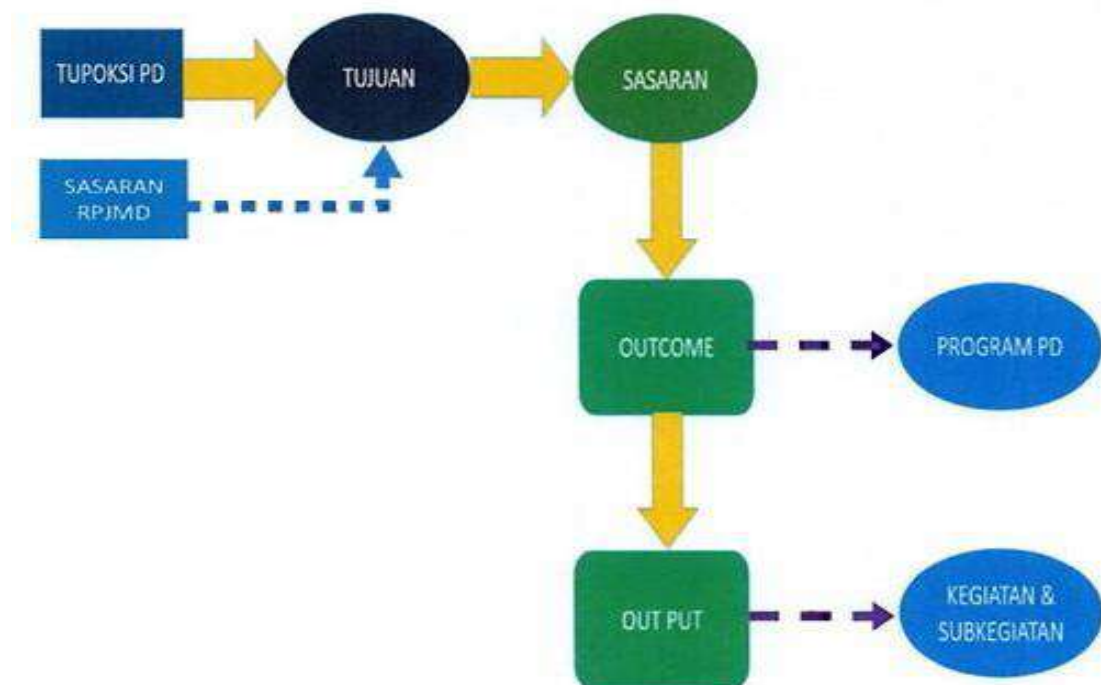
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output berdasarkan siklus peyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimana nomenklatur Program, kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri termasuk pemutahirannya.

Sedangkan daftar Program, kegiatan dan Subkegiatan dalam mencapai target kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dimana Program, kegiatan dan Subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu sebagai pijakan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2030, gambaran kerangka perumusan Program, kegiatan dan Subkegiatan tergambar pada gambar 4.1 berikut :

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD**



Program, kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
- Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berbasis transformasi digital	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)		
					Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)		
		Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)		
		Meningkatnya pemberdayaan sosial			Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan Sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
					Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi)	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01.0004 - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	
					Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi)	1.06.02.2.01.0005 - Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	
				Terstrukturanya pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota		1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/ kota	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	1.06.02.2.03.0010 - Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
					Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase (%) lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase (%) penyandang disabilitas terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terfasilitasinya penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter, gelandangan, pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	1.06.04.2.01.0015 - Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
------------------------------------	--------	---------	---------	--------	-----------	----------------------------------	------------

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0009 - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
------------------------------------	--------	---------	---------	--------	-----------	----------------------------------	------------

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)	1.06.04.2.02.0017 - Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
					Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terpeliharanya anak - anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	1.06.05.2.01.0004 - Fasilitas Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

				Terkelolanya DTKS / DTSEN cakupan daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0009 - Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)	1.06.05.2.02.0010 - Fasilitas bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial (Daerah)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Kekeragaman Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) (Dokumen)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)	1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	1.06.06.2.02.0007 - Fasilitas Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) (Dokumen)	1.06.06.2.02.0009 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
					Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial (Daerah)	1.06.06.2.02.0010 - Fasilitas Pemetaan Rawan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)	1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 – PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Terselenggaranya pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01 - Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.02.0006 - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Peningkatan dan berkembangnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)	2.08.02.2.03.0011 - mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terwujudnya pembinaan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkat dan berkembangnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten /kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

				Tersedianya layanan komprehensif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

				Berkurangnya kekerasan terhadap anak	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	

					bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.07.2.03.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yang akan dilaksanakan selama lima tahun dapat diuraikan sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.792.659.420		7.480.528.426		10.110.289.305		10.707.772.065		11.889.152.704	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.250.186.887		5.689.996.569		6.905.106.603		7.427.457.592		8.529.656.221	
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	68,88	69	69,1	5.250.186.887	69,33	5.689.996.569	69,56	6.905.106.603	69,79	7.427.457.592	70,02	8.529.656.221	DINSOSP3A
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					294.108.506		298.520.134		579.770.990		585.240.125		590.790.813	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	17	18	20	294.108.506	22	298.520.134	25	579.770.990	30	585.240.125	35	590.790.813	Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					482.775.400		506.914.170		827.134.879		860.441.622		896.713.954	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	8	1	1	482.775.400	1	506.914.170	1	827.134.879	1	860.441.622	1	896.713.954	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	63,64	64	64		64		64		64				
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	3,22	2	2		2		2		2				
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	9	9	9		9		9		9				
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	60,28	5	5		5		5		5		5		

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					215.184.657		359.688.070		800.570.891		812.579.454		824.768.146	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	60,47	61	62,02	215.184.657	63,57	359.688.070	65,12	800.570.891	66,67	812.579.454	68,22	824.768.146	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,45	0,5	0,52		0,55		0,57		0,6		0,63		
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0,89	0,9	1,03		1,34		1,64		1,95		2,26		
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	16,55	16,3	16,4		16,42		16,49		16,56		16,63		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					487.913.519		561.606.733		902.563.334		925.092.672		948.409.494	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	487.913.519	100	561.606.733	100	902.563.334	100	925.092.672	100	948.409.494	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100	100	100		100						
	Persentase mesyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	0,21	0,25	0,28	0,35	0,42		0,49		0,56				
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					62.490.451		63.802.750		95.142.608		96.960.600		98.814.076	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	62.490.451	100	63.802.750	100	95.142.608	100	96.960.600	100	98.814.076	Bidang Pemberdayaan Sosial
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.038.019.876		1.079.584.715		1.236.492.758		1.293.676.321		1.362.267.464	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					485.260.796		495.451.273		505.855.750		516.478.720		527.324.774	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55	55.5	56		57		58		59		60		

2025-2026														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					20.000.000		20.300.000		30.302.250		30.756.784		31.584.123	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0,03	0,03	0,04	20.000.000	0,04	20.300.000	0,05	30.302.250	0,05	30.756.784	0,05	31.584.123	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					248.010.596		260.411.125		273.431.682		287.103.266		301.458.429	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	55	56	58	248.010.596	60	260.411.125	64	273.431.682	68	287.103.266	70	301.458.429	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					16.983.682		25.475.523		38.213.285		57.319.927		85.979.890	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	30	33	35	16.983.682	40	25.475.523	45	38.213.285	50	57.319.927	55	85.979.890	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					257.764.802		267.796.794		308.287.541		319.709.340		331.642.340	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	68	68	69	257.764.802	70	267.796.794	72	308.287.541	74	319.709.340	76	331.642.340	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					10.000.000		10.150.000		80.402.250		82.308.284		84.277.908	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	73,11	74	75	10.000.000	76	10.150.000	77	80.402.250	78	82.308.284	79	84.277.908	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100				
TOTAL KESELURUHAN					7.830.679.296		8.560.113.141		11.346.782.063		12.001.448.3860		13.251.420.168	

Pemenuhan Kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui indikator - indikator kinerja yang telah ditetapkan memerlukan pendanaan untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3 dibawah ini :

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.792.659.420		7.480.528.426		10.110.289.305		10.707.772.065		11.889.152.704				
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.250.186.887		5.689.996.569		6.905.106.603		7.427.457.592		8.529.656.221				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	68,88	69,1	5.250.186.887	69,33	5.689.996.569	69,56	6.905.106.603	69,79	7.427.457.592	70,02	8.529.656.221	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				71.252.009		92.199.387		121.159.356		104.117.324		107.191.690				
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	71.252.009	1	92.199.387	1	121.159.356	1	104.117.324	1	107.191.690				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	1	1		1		1				1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.083.569		3.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.083.569	2	3.000.000	2	5.000.000	2	5.075.000	2	5.151.125		
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.083.569		3.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.083.569	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.083.569		5.000.000		15.000.000		5.075.000		5.151.125		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.083.569	1	5.000.000	1	15.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.083.569		5.000.000		15.000.000		5.075.000		5.151.125		

2025 2020														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.083.569	1	5.000.000	1	15.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.083.569		5.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.083.569	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.083.569		5.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	3.083.569	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.332.750		39.199.387		41.159.356		43.217.324		45.378.190		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	37.332.750	1	39.199.387	1	41.159.356	1	43.217.324	1	45.378.190		
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.083.569		5.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	3.083.569	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.083.569		5.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	3.083.569	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		2.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	0	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				3.083.569		5.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	3.083.569	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				3.083.569		5.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	1	1	3.083.569	1	5.000.000	1	5.000.000		5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				3.083.569		5.000.000		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1	3.083.569	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.432.752.813		4.693.435.454		5.009.810.377		5.325.845.088		5.585.526.356		
Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	4.432.752.813	30	4.693.435.454	30	5.009.810.377	30	5.325.845.088	30	5.585.526.356		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		0		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.309.305.613		4.561.770.894		4.846.509.438		5.155.084.910		5.406.899.170		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	4.309.305.613	30	4.561.770.894	30	4.846.509.438	30	5.155.084.910	30	5.406.899.170		
1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		2.045.000		2.200.401		2.254.613		2.367.343		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	1	2.045.000	1	2.200.401	1	2.254.613	1	2.367.343		
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				123.447.200		129.619.560		136.100.538		142.905.565		150.050.843		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	123.447.200	1	129.619.560	1	136.100.538	1	142.905.565	1	150.050.843		
1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		5.000.000		5.150.000		5.302.250		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	20.302.250		
1.06.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		10.000.000		10.150.000		20.302.250		

			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025-2030														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		0			5.000.000		5.150.000		5.302.250		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	20.302.250		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.150.000	1	5.302.250		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0		0			5.000.000		5.150.000		5.302.250		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.150.000	1	5.302.250		
1.06.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		0			5.000.000		5.075.000		5.151.125		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125		
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				61.388.012		64.457.413		127.680.832		129.595.487		191.539.190		
Terselenggaranya penatausahaan / administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	61.388.012	0	64.457.413	1	127.680.832	1	129.595.487	1	191.539.190		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		0			10.000.000		10.150.000		20.302.250		

2025-2029														
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				0			10.000.000	1	10.150.000	1	20.302.250		
1.06.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0			10.000.000		10.150.000		20.302.250		
1.06.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0		0	10.000.000		10.150.000		20.302.250		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	20.302.250		
1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0		0	10.000.000		10.150.000		20.302.250		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	20.302.250		
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					61.388.012		64.457.413		67.680.832		68.695.487		69.725.690	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		61.388.012	2	64.457.413	2	67.680.832	2	68.695.487	2	69.725.690	
1.06.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					0		0	10.000.000		10.150.000		20.302.250		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	20.302.250		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.225.000		56.127.396		145.000.000		129.124.841		152.911.713	
Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	15.225.000	50	56.127.396	1	145.000.000	1	129.124.841	1	152.911.713		
	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0				0		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0				0		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0				0		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0				0		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0				0		1		1		1	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Org)	2	2				2		2		2		2	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0				0		5		5		5	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0				1		1		1		1	
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0				0		1		1		1	
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														

2025-2030														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		0		1		1		1			
1.06.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		25.000.000		25.000.000		10.150.000		10.302.250		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	50	25.000.000	1	25.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
1.06.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
1.06.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
1.06.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
1.06.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		10.000.000		10.000.000		10.150.000		20.302.250		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.150.000	1	20.302.250		
1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan				0		0		10.000.000		10.150.000		32.302.250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	5	10.000.000	5	10.150.000	5	32.302.250			
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.225.000		21.127.396		30.000.000		27.624.841		17.889.213			
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2	15.225.000	2	21.127.396	2	30.000.000	2	27.624.841	2	17.889.213			
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				208.311.415		218.332.986		355.629.634		502.351.079		561.844.791			
Terselenggaranya pelayanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	208.311.415	2	218.332.986	2	355.629.634	2	502.351.079	2	561.844.791			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0				0		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0				0		1		1			1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1				1		1		1			1	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		0				0		1		1			1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1		1		1			1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12				12		12		12			12	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1				1		1		1			1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0				0		1		1			1	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0				0		1		1			1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1		1		1			1	
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250			

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	RANGKAIAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)				2025-2029	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250	
---	--	--	--	--	--	-----------	---	------------	---	------------	---	------------	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				68.716.921		72.152.767		75.760.405		76.896.811		78.050.264		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	68.716.921	1	72.152.767	1	75.760.405	1	76.896.811	1	78.050.264		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		10.000.000		20.150.000		20.302.250		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	20.150.000	1	20.302.250		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.428.381		31.949.800		33.547.290		84.050.499		94.561.256		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.428.381	1	31.949.800	1	33.547.290	1	84.050.499	1	94.561.256		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.673.290		13.306.955		13.972.302		24.818.887		24.394.615		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	12.673.290	1	13.306.955	1	13.972.302	1	24.818.887	1	24.394.615		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.212.823		6.523.464		6.849.637		16.952.382		17.056.668		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	6.212.823	2	6.523.464	2	6.849.637	2	16.952.382	2	17.056.668		
1.06.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.280.000		10.400.000		25.500.000		28.882.500		26.270.738		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	10.280.000	1	10.400.000	1	25.500.000	1	28.882.500	1	26.270.738		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		84.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	80.000.000	12	84.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000		
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		10.000.000		20.150.000		20.302.250		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	20.150.000	1	20.302.250		
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	2025-2029	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250	
RANGKAPAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.832.532		103.424.158		658.595.366		668.474.296		1.301.898.011		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	31.832.532	0	103.424.158	0	658.595.366	0	668.474.296	1	1.301.898.011		
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		5		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)													
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		10.000.000		10.150.000		10.657.500		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	5	10.000.000	5	10.150.000	5	10.657.500		

1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		200.000.000		203.000.000		213.150.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	203.000.000	1	213.150.000		
1.06.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0		0		0		0		200.000.000		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000		
1.06.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		0		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000		
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				31.832.532		33.424.158		35.095.366		35.621.796		137.402.886		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	31.832.532	1	33.424.158	1	35.095.366	1	35.621.796	1	137.402.886		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		70.000.000		73.500.000		74.602.500		178.332.625		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	0	2	70.000.000	2	73.500.000	2	74.602.500	2	178.332.625		
1.06.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		180.000.000		182.700.000		191.835.000		

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)													
2025-2029													
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)						1	180.000.000	1	182.700.000	1	191.835.000	
1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		160.000.000		162.400.000		170.520.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0	1	160.000.000	1	162.400.000	1	170.520.000	
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201.243.035		222.820.388		245.961.407		315.622.378		324.244.702	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	201.243.035	12	222.820.388	12	245.961.407	12	315.622.378	12	324.244.702	

2025-2029														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		180.000.000		182.700.000		191.835.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0	1	180.000.000	1	182.700.000	1	191.835.000		
1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		160.000.000		162.400.000		170.520.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0	1	160.000.000	1	162.400.000	1	170.520.000		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201.243.035		222.820.388		245.961.407		315.622.378		324.244.702		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	201.243.035	12	222.820.388	12	245.961.407	12	315.622.378	12	324.244.702		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		0		0		0		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		0		10		1		1			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		2.000.000		16.000.000		16.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	16.000.000	12	16.000.000		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.484.799		78.174.240		82.082.952		90.000.000		90.496.455		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	63.484.799	12	78.174.240	12	82.082.952	12	90.000.000	12	90.496.455		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		10.000.000		50.150.000		50.302.250		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	10	10.000.000	1	50.150.000	1	50.302.250		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				137.758.236		144.646.148		151.878.455		159.472.378		167.445.997		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	137.758.236	12	144.646.148	12	151.878.455	12	159.472.378	12	167.445.997		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				228.182.071		239.199.387		241.269.631		252.327.099		304.499.768		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)			228.182.071		239.199.387		241.269.631		252.327.099		304.499.768		
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					28.182.071		39.199.387		41.269.631		43.333.112		45.499.768	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		11	28.182.071	11	39.199.387	11	41.269.631	11	43.333.112	11	45.499.768	
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				0		0		0		0		0	
1.06.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya					0		0		0		0		0	
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)				0		0		0		0		0	
1.06.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)				0		0		0		0		0	
1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					0		0		0		8.993.987		9.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)				0		0		0	25	8.993.987	25	9.000.000	
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	250.000.000		
1.06.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)			0		0		0		0		0		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				294.108.506		298.520.134		579.770.990		585.240.125		590.790.813		
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	17	20	294.108.506	22	298.520.134	25	579.770.990	30	585.240.125	35	590.790.813	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				214.091.378		218.000.000		415.000.000		409.000.000		412.045.000		
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan Sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3	3	214.091.378	3	218.000.000	3	415.000.000	3	409.000.000	3	412.045.000		

	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0	50		50		50		50		40			
	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	100		50		50		50		40			
1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT				52.000.000		53.000.000		200.000.000		206.000.000		206.045.000		
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0	50	52.000.000	50	53.000.000	50	200.000.000	50	206.000.000	40	206.045.000		
1.06.02.2.01.0004 - Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan				151.091.378		153.000.000		200.000.000		186.000.000		190.000.000		
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	100	151.091.378	50	153.000.000	50	200.000.000	50	186.000.000	40	190.000.000		
1.06.02.2.01.0005 - Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT				11.000.000		12.000.000		15.000.000		17.000.000		16.000.000		
Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3	3	11.000.000	3	12.000.000	3	15.000.000	3	17.000.000	3	16.000.000		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terstrukturnya pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				80.017.128		80.520.134		164.770.990		176.240.125		178.745.813		
Terselenggaranya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	9	8	80.017.128	8	80.520.134	8	164.770.990	8	176.240.125	8	178.745.813		
	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	0	0		0		2		2		2			
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0			0		50		50		50			
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	6		6		6		6		6			

2025 2020														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	0		0		2		2		2			
	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	0		0		2		2		2			
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)								2		2			
	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0				0			
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0		0	0	0	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	6	0	6	0	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000		
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	9	8	0	8	0	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000		
1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

2025-2030														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	0	0	0	0	0	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	0	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	0	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				80.017.128		80.520.134		84.770.990		86.240.125		88.745.813		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	13	13	80.017.128	13	80.520.134	13	84.770.990	13	86.240.125	13	88.745.813		
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	0	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	0	0	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)			0		0		0	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				482.775.400		506.914.170		827.134.879		860.441.622		896.713.954		

2025-2030														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	60,28	5	482.775.400	5	506.914.170	5	827.134.879	5	860.441.622	5	896.713.954	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	3,22	2		2		2		2		2			
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	63,64	64		64		64		64		64			
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	8	1		1		1		1		1			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	9	9		9		9		9		9			9
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				379.975.500		402.124.275		617.105.489		627.510.766		687.206.551		
Terfasilitasinya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	379.975.500	10	402.124.275	20	617.105.489	20	627.510.766	20	687.206.551		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3		8		20		20		20			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3		8		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5		5		5		5		5			5

2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3		8		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.409	200		200		200		200					
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	0	3		8		10		10					
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		50		50					
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3		8		10		10					
	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	3		8		10		10					
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10		10		25		25					
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10		10		15		15					
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				264.589.800		272.319.290		290.685.255		302.407.626		319.455.493		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.409	200	264.589.800	200	272.319.290	200	290.685.255	200	302.407.626	200	319.455.493		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				0		0		57.000.000		50.750.000		58.511.250		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	50	57.000.000	50	50.750.000	50	58.511.250		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				53.385.700		58.465.430		62.288.702		62.253.137		66.165.793		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	53.385.700	15	58.465.430	15	62.288.702	15	62.253.137	15	66.165.793		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.000.000		13.000.000		20.000.000		20.300.000		25.604.500		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	9.000.000	5	13.000.000	5	20.000.000	5	20.300.000	5	25.604.500		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				0		0		20.000.000		20.000.003		25.315.000		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	0	10	0	25	20.000.000	25	20.000.003	25	25.315.000		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				0		0		20.000.000		20.300.000		25.315.000		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	0	10	0	15	20.000.000	15	20.300.000	15	25.315.000		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				4.000.000		3.000.000		20.000.000		20.300.000		25.315.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	4.000.000	50	3.000.000	50	20.000.000	50	20.300.000	50	25.315.000		
1.06.04.2.01.0009 -Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				7.000.000		7.500.000		20.000.000		20.300.000		25.315.000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	7.000.000	10	7.500.000	20	20.000.000	20	20.300.000	20	25.315.000		
1.06.04.2.01.0010 -Pemberian Layanan Kedaruratan				9.000.000		10.000.000		20.000.000		20.300.000		23.500.515		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	9.000.000	10	10.000.000	10	20.000.000	10	20.300.000	10	23.500.515		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				6.000.000		5.000.000		20.000.000		20.300.000		20.604.500		

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)													2025-2029			
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	8.000.000	2	10	20.000.000	10	20.300.000	10	20.604.500					
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				4.500.000		5.500.000		20.000.000		20.300.000		20.604.500				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	4.500.000	8	5.500.000	20	20.000.000	20	20.300.000	20	20.604.500		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				4.500.000		5.500.000		10.000.000		10.000.000		10.300.000		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	4.500.000	8	5.500.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.300.000		
1.06.04.2.01.0015 - Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis				4.500.000		5.500.000		10.000.000		10.000.000		10.300.000		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	3	4.500.000	8	5.500.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.300.000		
1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)				4.500.000		5.500.000		10.000.000		10.000.000		10.300.000		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	4.500.000	8	5.500.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.300.000		
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				4.500.000		5.500.000		7.500.000		10.000.000		10.300.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	4.500.000	8	5.500.000	10	7.500.000	10	10.000.000	10	10.300.000		

2025 2020														
1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial				4.500.000		5.339.555		9.631.532		10.000.000		10.300.000		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	0	3	4.500.000	8	5.339.555	10	9.631.532	10	10.000.000	10	10.300.000		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				102.799.900		104.789.895		210.029.390		232.930.856		209.507.403		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	102.799.900	50	104.789.895	50	210.029.390	50	232.930.856	50	209.507.403		
	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50		50		50		50					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		5		5					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		20		20					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		20		20					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1							

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		5		5		5		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		50		50		50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		50		50		50			
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1					

2025-2026														
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		50		50		50			
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				0		0		10.000.000		11.100.000		11.025.000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	20	10.000.000	20	11.100.000	20	11.025.000		
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				0		0		10.000.000		11.100.000		11.025.000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	20	10.000.000	20	11.100.000	20	11.025.000		
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan				0		0		10.000.000		11.100.000		11.025.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	50	10.000.000	50	11.100.000	50	11.025.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				0		0		10.000.000		11.100.000		11.025.000		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	50	10.000.000	50	11.100.000	50	11.025.000		
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu				0		0		10.000.000		11.000.000		11.025.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	5	10.000.000	5	11.000.000	5	11.025.000		
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				0		0		10.000.000		11.000.000		11.025.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	5	10.000.000	5	11.000.000	5	11.025.000		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				0		0		10.000.000		11.000.000		11.025.000		

Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)				2025-2029		50	10.000.000	50	11.000.000	50	11.025.000		
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				51.000.000		52.500.000		75.125.000		60.881.250		60.775.313			
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	51.000.000	50	52.500.000	50	75.125.000	50	60.881.250	50	60.775.313			
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				0		0		10.000.000		11.000.000		11.025.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	5	10.000.000	5	11.000.000	5	11.025.000		
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				51.799.900		52.289.895		54.904.390		72.649.606		60.532.090		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	51.799.900	50	52.289.895	50	54.904.390	50	72.649.606	50	60.532.090		
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0		0		0		2.000.000		0		

2025-2029														
TerpenuhiOrang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	0	1	0	0	1	2.000.000	0				
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				0		0		0	1.000.000	0				
TerpenuhiOrang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	0	1	0	1	0	1.000.000	0				
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				0		0		0	1.000.000	0				
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	0	1	0	1	0	1.000.000	0				
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					0		0	0	1.000.000		0			
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		0	1		0	1.000.000		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				0		0		0		2.000.000		0		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	0	1	0	1	0	1	2.000.000	1	0		
1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				0		0		0		2.000.000		0		
Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	1	1	0	1	0	1	0	1	2.000.000	1	0		

2025-2020													
1.06.04.2.02.0017 - Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				0		0		0		2.000.000		0	
Lainnya													
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)	1	1	0	1	0	1	0	1	2.000.000	1	0	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				215.184.657		359.688.070		800.570.891		812.579.454		824.768.146	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	16,55	16,4	215.184.657	16,42	359.688.070	16,49	800.570.891	16,56	812.579.454	16,63	824.768.146	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	60,47	62,02		63,57		65,12		66,67		68,22		
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dari kemiskinan (%)	0,45	0,52		0,55		0,57		0,6		0,63		
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0,89	1,03		1,34		1,64		1,95		2,26		
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				44.027.655		44.688.070		210.733.391		214.894.391		217.102.808	
Terpeliharanya anak - anak terlantar	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)			44.027.655		44.688.070		210.733.391		214.894.391		217.102.808	
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		7		9		11		13		
	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		9		11		13		
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		9		11		13		
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				44.027.655		44.688.070		45.358.391		47.038.766		46.729.349	
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	44.027.655	7	44.688.070	9	45.358.391	11	47.038.766	13	46.729.349	
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar				0		0		77.175.000		78.332.625		79.507.614	
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	9	77.175.000	11	78.332.625	13	79.507.614	
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				0		0		88.200.000		89.523.000		90.865.845	

2025-2029													
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpantau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	9	88.200.000	11	89.523.000	13	90.865.845		
1.06.05.2.01.0004 - Fasilitas Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi				0	0	0	0	0	0	0	0		
Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)			0	0	0	0	0	0	0	0		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				171.157.002		315.000.000		589.837.500		597.685.063		607.665.338	
Terkelolanya DTKS / DTSEN cakupan daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6.761	0	171.157.002	0	315.000.000	9.891	589.837.500	9.988	597.685.063	10.085	607.665.338	
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	114.850	114.850		115.000		116.000		117.000		118.000		
	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)												
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	0		0		330		330		340		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	19.166	19.066		18.966		18.866		18.766		18.666			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				37.557.322		157.500.000		165.375.000		167.855.625		170.373.459		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	114.850	114.850	37.557.322	115.000	157.500.000	116.000	165.375.000	117.000	167.855.625	118.000	170.373.459		

2025-2026													
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				0		0		143.325.000		145.474.875		147.656.998	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	0	0	0	0	330	143.325.000	330	145.474.875	340	147.656.998	
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				0		0		115.762.500		117.498.938		119.261.422	
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6.761	0	0	0	0	9.891	115.762.500	9.988	117.498.938	10.085	119.261.422	
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				133.599.680		157.500.000		165.375.000		166.855.625		170.373.459	
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	19.166	19.066	133.599.680	18.966	157.500.000	18.866	165.375.000	18.766	166.855.625	18.666	170.373.459	
1.06.05.2.02.0009 - Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				0		0		0		0		0	
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0	
1.06.05.2.02.0010 - Fasilitas bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Terlaksananya fasilitas bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)			0		0		0		0		0	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				487.913.519		561.606.733		902.563.334		925.092.672		948.409.494	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase mesyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	0,21	0,28	487.913.519	0,35	561.606.733	0,42	902.563.334	0,49	925.092.672	0,56	948.409.494	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100		100		100		100					

2025-2030													
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				487.913.519		561.606.733		902.563.334		925.092.672		948.409.494	
Tercapainya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54	0	487.913.519	50	561.606.733	50	902.563.334	50	925.092.672	50	948.409.494	
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	984		0		30		35		40		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54	200		250		300		350		400		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	391	410		350		355		360		365		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	391	50		50		50		50		50		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				332.962.299		280.606.733		325.305.834		304.060.422		357.871.328	
Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupatn/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54	200	332.962.299	250	280.606.733	300	325.305.834	350	304.060.422	400	357.871.328	
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				60.000.000		64.000.000		100.000.000		150.750.000		151.511.250	
Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	391	50	60.000.000	50	64.000.000	50	100.000.000	50	150.750.000	50	151.511.250	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				94.951.220		175.500.000		165.375.000		217.855.625		253.586.416	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	391	410	94.951.220	350	175.500.000	355	165.375.000	360	217.855.625	365	253.586.416		

2025 2020													
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				0		41.500.000		140.000.000		121.350.000		92.720.250	
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54	0	0	50	41.500.000	50	140.000.000	50	121.350.000	50	92.720.250	
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				0		0		171.882.500		131.076.625		92.720.250	
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	984	0	0	0	30	171.882.500	35	131.076.625	40	92.720.250	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)			0		0		0		0		0	
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)												
	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)												
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)												
	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)												
	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)												
	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)												
	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial (Daerah)												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2025-2020													
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) (Dokumen)												
	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)												
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			0		0		0		0		0		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			0		0		0		0		0		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda			0		0		0		0		0		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam			0		0		0		0		0		
Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0005 - Fasilitas Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana			0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana			0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0007 - Fasilitas Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana			0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah			0		0		0		0		0		

2025-2026														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)			0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0009 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0010 - Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial				0		0		0		0		0		
Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial (Daerah)			0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana					0			0			0			
Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)				0			0			0			
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				62.490.451		63.802.750		95.142.608		96.960.600		98.814.076		
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	62.490.451	100	63.802.750	100	95.142.608	100	96.960.600	100	98.814.076	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				62.490.451		63.802.750		95.142.608		96.960.600		98.814.076		
Terpeliharanya taman makam pahlawan nasional	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	62.490.451	1	63.802.750	1	95.142.608	1	96.960.600	1	98.814.076		
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1		1			
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				11.000.000		11.300.000		11.500.000		12.000.000		13.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	11.000.000	1	11.300.000	1	11.500.000	1	12.000.000	1	13.000.000		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				19.490.451		19.802.750		49.542.608		49.660.600		49.907.326		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	19.490.451	1	19.802.750	1	49.542.608	1	49.660.600	1	49.907.326		
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.06.07.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				10.000.000		10.200.000		10.800.000		11.650.000		11.800.000		
Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	10.000.000	1	10.200.000	1	10.800.000	1	11.650.000	1	11.800.000		
1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				10.000.000		10.500.000		11.300.000		11.650.000		12.106.750		
Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	10.000.000	50	10.500.000	50	11.300.000	50	11.650.000	50	12.106.750		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.038.019.876		1.079.584.715		1.236.492.758		1.293.676.321		1.362.267.464		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				485.260.796		495.451.273		505.855.750		516.478.720		527.324.774		

2025-2029													
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9	10	485.260.796	15	495.451.273	20	505.855.750	25	516.478.720	30	527.324.774	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55	56		57		58		59		60			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				191.269.171		200.451.273		213.914.779		220.978.720		224.324.774		
Terselenggaranya pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	1	191.269.171	2	200.451.273	3	213.914.779	4	220.978.720	4	224.324.774		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				30.000.000		24.680.867		48.500.000		49.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	24.680.867	1	48.500.000	1	49.000.000	1	50.000.000		
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				67.490.451		78.802.750		66.142.608		67.236.967		67.907.326		

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)				2025-2029	1	66.142.608	1	67.236.967	1	67.907.326		
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000		15.000.000		18.500.000		19.500.000		20.000.000		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	1	25.000.000	1	15.000.000	1	18.500.000	1	19.500.000	1	20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000		15.000.000		15.800.000		16.000.000		16.390.818		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	25.000.000	1	15.000.000	1	15.800.000	1	16.000.000	1	16.390.818		
2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000		15.000.000		13.500.000		14.500.000		15.000.000		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	5.000.000	1	15.000.000	1	13.500.000	1	14.500.000	1	15.000.000		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				33.778.720		36.967.656		37.972.171		40.241.753		40.026.630		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	1	33.778.720	1	36.967.656	1	37.972.171	1	40.241.753	1	40.026.630		
2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000		15.000.000		13.500.000		14.500.000		15.000.000		
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	1	5.000.000	2	15.000.000	3	13.500.000	4	14.500.000	4	15.000.000		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				213.991.625		155.000.000		205.140.971		207.500.000		215.000.000		
Terselenggaranya pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	1	1	213.991.625	1	155.000.000	1	205.140.971	1	207.500.000	1	215.000.000		

	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	1		1		1		1		1		
--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				35.000.000		20.000.000		34.500.000		34.500.000		35.000.000		
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	1	1	35.000.000	1	20.000.000	1	34.500.000	1	34.500.000	1	35.000.000		
2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000		25.000.000		34.500.000		35.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	1	1	35.000.000	1	25.000.000	1	34.500.000	1	35.000.000	1	40.000.000		

2025-2030													
2.08.02.2.02.0006 - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000		27.500.000		34.140.971		34.500.000		35.000.000	
Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	35.000.000	1	27.500.000	1	34.140.971	1	34.500.000	1	35.000.000	
2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				40.000.000		27.500.000		34.000.000		34.500.000		35.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	1	40.000.000	1	27.500.000	1	34.000.000	1	34.500.000	1	35.000.000		
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				40.000.000		27.500.000		34.000.000		34.500.000		35.000.000		
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	1	1	40.000.000	1	27.500.000	1	34.000.000	1	34.500.000	1	35.000.000		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				28.991.625		27.500.000		34.000.000		34.500.000		35.000.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	1	28.991.625	1	27.500.000	1	34.000.000	1	34.500.000	1	35.000.000		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000		140.000.000		86.800.000		88.000.000		88.000.000		
Peningkatan dan berkembangnya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)	0	1	80.000.000	1	140.000.000	1	86.800.000	1	88.000.000	1	88.000.000		
	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1		1			1		1			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	1		1	1		1		1			
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		35.000.000		21.700.000		22.000.000		22.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	20.000.000	1	35.000.000	1	21.700.000	1	22.000.000	1	22.000.000		
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		35.000.000		21.700.000		22.000.000		22.000.000		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1	20.000.000	1	35.000.000		21.700.000	1	22.000.000	1	22.000.000		
2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		35.000.000		21.700.000		22.000.000		22.000.000		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	1	20.000.000	1	35.000.000	1	21.700.000	1	22.000.000	1	22.000.000		
2.08.02.2.03.0011 - mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat				20.000.000		35.000.000		21.700.000		22.000.000		22.000.000		

2025-2020														
kabupaten/kota.														
Terlaksananya Advokast dan sosaltsast penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)	0	1	20.000.000	1	35.000.000	1	21.700.000	1	22.000.000	1	22.000.000		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				20.000.000		20.300.000		30.302.250		30.756.784		31.584.123		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0,03	0,04	20.000.000	0,04	20.300.000	0,05	30.302.250	0,05	30.756.784	0,05	31.584.123	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		4.150.000		10.000.000		20.300.000		10.300.000		
Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	4.150.000	1	10.000.000	1	20.300.000	1	10.300.000		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)								1					
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)								1					
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				2.500.000		2.075.000		5.000.000		5.075.000		5.150.000		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	1	2.500.000	1	2.075.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.150.000		
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				2.500.000		2.075.000		5.000.000		5.075.000		5.150.000		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	2.500.000	1	2.075.000	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.150.000		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		5.075.000		0		

2025-2029														
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	RANGKAPAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)			0			0	1	5.075.000		0		
2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		5.075.000		0		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)			0		0		0	1	5.075.000		0		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.306.784		10.456.784		10.302.250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)			10.000.000		10.000.000		10.306.784		10.456.784		10.302.250		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)													
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)													
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)													
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat/Kota (Orang)													

2025-2026													
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	1		1			1		1			
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				10.000.000		10.000.000		10.306.784		10.456.784		10.302.250	
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	1	10.000.000	1	10.000.000		10.306.784	1	10.456.784	1	10.302.250	
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0	

2025-2028

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)			0		0		0		0		0		
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0		
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)			0		0		0		0		0		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)				0		0		0		0		0	
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					0		0		0		0		0	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)				0		0		0		0		0	
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		6.150.000		9.995.466		0		10.981.873	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)			5.000.000		6.150.000		9.995.466	0			10.981.873		
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)													
	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)													
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)													
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0	0		0			
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)			0		0		0	0		0			
2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000		6.150.000		9.995.466	0			10.981.873		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	0	1	5.000.000	1	6.150.000	1	9.995.466	1	0	1	10.981.873		

2025-2020													
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)			0		0		0		0		0	
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)			0		0		0		0		0	
2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				248.010.596		260.411.125		273.431.682		287.103.266		301.458.429	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	55	58	248.010.596	60	260.411.125	64	273.431.682	68	287.103.266	70	301.458.429	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				118.485.016		119.859.266		120.902.230		121.122.341		137.028.458	
Terwujudnya pembinaan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	118.485.016	1	119.859.266	1	120.902.230	1	121.122.341	1	137.028.458	
	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)		1		1		1		1		1		
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000		
2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000		
2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		

RANGKAIAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)													
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada penerima manfaat dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga		1	10.000.000	1	2025-2029	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	
	Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)												

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				88.485.016		89.859.266		90.902.230		91.122.341		92.028.458		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	1	1	88.485.016	1	89.859.266	1	90.902.230	1	91.122.341	1	92.028.458		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				67.525.580		76.351.859		87.840.000		93.150.000		90.488.100		

2025-2030													
Meningkat dan berkembangnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerja nya dalam daerah kabupaten /kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	67.525.580	1	76.351.859	1	87.840.000	1	93.150.000	1	90.488.100	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				17.500.000		18.000.000		18.410.000		18.630.000		19.862.025		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	17.500.000	1	18.000.000	1	18.410.000	1	18.630.000	1	19.862.025		
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				16.500.000		17.000.000		17.410.000		18.630.000		19.862.025		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	16.500.000	1	17.000.000	1	17.410.000	1	18.630.000	1	19.862.025		
2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				16.500.000		17.000.000		17.410.000		18.630.000		21.862.025		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	16.500.000	1	17.000.000	1	17.410.000	1	18.630.000	1	21.862.025		
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				16.500.000		17.000.000		17.410.000		18.630.000		19.862.025		

RANGKAIAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)														2025-2029	
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	1	18.500.000	1		1	17.410.000	1	18.630.000	1	19.862.025			
2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				525.580		7.351.859		17.200.000		18.630.000		9.040.000			
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	525.580	1	7.351.859	1	17.200.000	1	18.630.000	1	9.040.000			
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				62.000.000		64.200.000		64.689.452		72.830.925		73.941.871			
Tersedianya layanan komprehensif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1	62.000.000	1	64.200.000	1	64.689.452	1	72.830.925		73.941.871			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1				1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1		1		1		1		1			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1		1		1		1					
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1		1		1		1		1			
2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				14.000.000		14.400.000		14.500.000		15.000.000		30.000.000		
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1	14.000.000	1	14.400.000	1	14.500.000	1	15.000.000	1	30.000.000		
2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota				14.000.000		14.400.000		14.500.000		15.000.000		30.000.000		
Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1	14.000.000	1	14.400.000	1	14.500.000	1	15.000.000	1	30.000.000		

2025-2026													
2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota				14.000.000		14.400.000		14.500.000		15.000.000		13.941.871	
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1	14.000.000	1	14.400.000	1	14.500.000	1	15.000.000	1	13.941.871	
2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				10.500.000		11.000.000		11.189.452		15.000.000		0	
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1	10.500.000	1	11.000.000	1	11.189.452	1	15.000.000		0	
2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				9.500.000		10.000.000		10.000.000		12.830.925		0	
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		1	9.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.830.925		0	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				16.983.682		25.475.523		38.213.285		57.319.927		85.979.890	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	30	35	16.983.682	40	25.475.523	45	38.213.285	50	57.319.927	55	85.979.890	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				16.983.682		25.475.523		38.213.285		57.319.927		85.979.890		
Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	16.983.682	1	25.475.523	1	38.213.285	1	57.319.927	1	85.979.890		
	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		20.000.000		30.000.000		50.000.000		

2025-2029 2025-2029														
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	RENCANA AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)					1	20.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000		
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				6.983.682		7.832.866		8.724.509		9.660.735		10.643.772		
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dna anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	1	6.983.682	1	7.832.866	1	8.724.509	1	9.660.735	1	10.643.772		
2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				0		7.642.657		9.488.776		17.659.192		25.336.118		
Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	0	0	0	1	7.642.657	1	9.488.776	1	17.659.192	1	25.336.118		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				257.764.802		267.796.794		308.287.541		319.709.340		331.642.340		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	68	69	257.764.802	70	267.796.794	72	308.287.541	74	319.709.340	76	331.642.340	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				176.157.706		183.965.591		184.213.870		193.774.564		203.827.543		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	176.157.706	5	183.965.591	5	184.213.870	5	193.774.564	5	203.827.543		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			

2025-2020													
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1		1		1		1		1		
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				39.000.000		39.000.000		39.000.000		40.000.000		45.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				25.157.706		26.700.000		26.713.870		31.500.000		31.827.543	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	25.157.706	5	26.700.000	5	26.713.870	5	31.500.000	5	31.827.543		
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				22.000.000		21.000.000		21.000.000		22.274.564		22.000.000		
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	22.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	22.274.564	1	22.000.000		
2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				90.000.000		97.265.591		97.500.000		100.000.000		105.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	90.000.000	1	97.265.591	1	97.500.000	1	100.000.000	1	105.000.000		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				81.607.096		83.831.203		124.073.671		125.934.776		127.814.797		
Meningkatnya jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	43	30	81.607.096	30	83.831.203	30	124.073.671	30	125.934.776	30	127.814.797		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0				1		1		1			

	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0		0		1		1		1			
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				81.607.096		83.831.203		84.073.671		85.334.776		86.614.797		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	43	30	81.607.096	30	83.831.203	30	84.073.671	30	85.334.776	30	86.614.797		
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.150.000		10.300.000		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0		0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.300.000		
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.150.000		10.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.300.000		
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.150.000		10.300.000		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.300.000		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.150.000		10.300.000		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.300.000		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				10.000.000		10.150.000		80.402.250		82.308.284		84.277.908		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	10.000.000	100	10.150.000	100	80.402.250	100	82.308.284	100	84.277.908	1.06.2.08.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	73,11	75		76		77		78		79			
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		

Berkurangnya kekerasan terhadap anak	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)			0	0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	0		0	1		1		1			
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)													
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)													
	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)													
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				0		0		10.000.000		10.150.000		10.302.250		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250		
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)			0		0		0		0		0		
2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)			0		0		0		0		0		

2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)			0				0		0		0		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)			0		0		0		0		0		
2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)			0		0		0		0		0		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.150.000		50.252.250		51.756.784		53.268.135		
Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	10.000.000	0	10.150.000	1	50.252.250	1	51.756.784	1	53.268.135		
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	20		20		20		20					
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		1		1		1			

	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		1				1			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		1		1		1			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000		10.150.000		15.302.250		15.456.784		15.613.636		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	20	10.000.000	20	10.150.000	20	15.302.250	20	15.456.784	20	15.613.636		
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		7.500.000		7.600.000		7.800.000		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	1	7.500.000	1	7.600.000	1	7.800.000		
2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		8.000.000		8.150.000		7.800.000		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	1	8.000.000	1	8.150.000	1	7.800.000		
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		4.400.000		4.500.000		3.500.000		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	1	4.400.000	1	4.500.000	1	3.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		3.500.000		3.600.000		3.800.000		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0		0	3.500.000	1	3.600.000	1	3.800.000		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		3.500.000		3.600.000		5.454.499		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0		0	3.500.000	1	3.600.000	1	5.454.499		
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		3.500.000		3.600.000		3.800.000		
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0		0	3.500.000	1	3.600.000	1	3.800.000		
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		4.550.000		5.250.000		5.500.000		
layanan layanan spesifik untuk pemulihan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0		0	4.550.000		5.250.000	1	5.500.000		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		20.150.000		20.401.500		20.707.523		
Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0		0	20.150.000	1	20.401.500	1	20.707.523		
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			

	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

DANG URUSAN / PROGRAM / JTCOME / KEGIATAN / BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0		0		1		1		1			
	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				0		0				2.850.000			
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	2.850.000	1	2.875.000	1	2.900.000		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				0	0	0		2.850.000		2.875.000		2.900.000		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	2.850.000	1	2.875.000	1	2.900.000		
2.08.07.2.03.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0		2.850.000		2.875.000		2.900.000		

terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATÉGIS (RENSTRA)					2025-2029		2.850.000	1	2.875.000	1	2.900.000	
---	--	---	--	--	--	--	-----------	--	-----------	---	-----------	---	-----------	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		2.850.000		2.875.000		2.900.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	0	0	0	1	2.850.000	1	2.875.000	1	2.900.000		
2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0		0	2.850.000		2.875.000		2.900.000		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0	0	0	2.850.000	1	2.875.000	1	2.900.000		
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai					0		0	2.850.000		2.875.000		2.900.000		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0		0	0	0	2.850.000	1	2.875.000	1	2.900.000		
2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0		0	3.050.000		3.151.500		3.307.523		

terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RĒNSTRAS)					2025-2029	1	3.050.000	1	3.151.500	1	3.307.523		
--	---	--	--	--	--	--	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	--	--

Dari rencana Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan beserta Pendanaannya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 diatas, dengan mempertimbangkan kondisi perangkat daerah dan kemampuan fiskal daerah, tidak semuanya mampu didanai dalam proses penganggaran APBD. Oleh karena itu perlu disusun daftar Subkegiatan prioritas yang wajib di danai untuk mendukung Program-Program Prioritas diantaranya. Secara spesifik daftar sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, disajikan pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	
			Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	
			Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
			Sub Kegiatan Penyediaan Akses Pendidikan dan layanan kesehatan	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
4	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Sub kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Sub kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Kegiatan - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	

1.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2025- 2029 di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman dalam pencapaian target-target pemerintah.

Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, secara spesifik IKU Perangkat Daerah disajikan pada tabel 4.4 berikut;

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,63	92,8	93,35	94,5	95	96,5	97	
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58,35	58,93	59	59,5	60	60,5	61	
4.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	9	9	9	9	9	9	9	

1.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Penyusunan dan penetapan target penyelenggaraan urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pencapaian target IKK ini akan menggambarkan bahwa urusan pemerintahan dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat. Secara spesifik IKK Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,63	92,8	93,35	94,5	95	96,5	97	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,26	66,26	66,26	67	67,62	69,87	70	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58,35	58,93	59	59,5	60	60,5	61	
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	68	68	69	70	72	74	76	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55	55,5	56	57	58	59	60	
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	73,11	74	75	76	77	78	79	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	60,28	5	5	5	5	5	5	
2	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	3,22	2	2	2	2	2	2	
3	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	8	1	1	1	1	1	1	
4	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persentase	9	9	9	9	9	9	9	
7	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	0,21	0,25	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	
8	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	16,55	16,3	16,4	16,42	16,49	16,56	16,63	
10	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	0,89	0,9	1,03	1,34	1,64	1,95	2,26	
11	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	60,47	61	62,02	63,57	65,12	66,67	68,22	
12	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	9	9	10	15	20	25	30	
13	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	30	33	35	40	45	50	55	
14	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	63,64	64	64	64	64	64	64	
15	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	
16	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dari kemiskinan	%	0,45	0,5	0,52	0,55	0,57	0,6	0,63	
18	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	55	56	58	60	64	68	70	
19	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	17	18	20	22	25	30	35	

BAB V

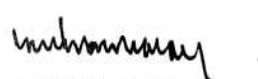
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025 – 2029 yang berisikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, beserta Indikator-Indikator Kinerjanya diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja organisasi dalam Kurun waktu 5 (lima) Tahun. Disamping itu juga disusun Renstra tahun 2030 yang merupakan tahun transisi sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja perangkat daerah untuk tahun 2030

Dokumen Renstra ini juga dapat mempertegas fungsi, tugas, peran, dan posisi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam kaitannya dengan pembangunan secara keseluruhan pada umumnya dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada khususnya. Namun demikian pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak dan pemangku kebijakan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karenanya Renstra ini juga dapat memberikan gambaran fungsi, tugas, dan peran dalam pelaksanaan program- program untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian Renstra mampu memberikan gambaran secara utuh tahapan-tahapan Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam setiap Tahunnya.

Muara Tebo, 2025
Kepala DINSOSP3A Kab.Tebo,



Drs. TAUFIK KHALDY
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700508 199303 1 004